Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
Website:http://jakp.fisip.unand.ac.id|Lisensi:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|
Email: Jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

THE IMPLEMENTATION OF SUBSIDIZED FERTILIZER POLICY AT THE DEPARTMENT OF HORTICULTURE AND PLANTATION CROPS IN SINJAI DISTRICT

Linda Irmalasari[1*], Muhammad Lutfi[1], Baharuddin[1]
[1] Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah sinjai, Makassar, Indonesia
[*] Corresponding Author: - lindairmalasari706@gmail.com

Article Information

Submitted : 26/02/2024
Review : 01/03/2024
Accepted : 31/03/2024
Published : 30/04/2024

DOI

https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.137-150. 2024

Keywords

Implementation; policy; Fertilizer Subsidi; Farmer Card *administration;*

Abstract

The provision of subsidy fertilizers for farmers is intended to increase progress in innovation changes in human resource development in the agricultural sector, subsidies as a supporting factor of optimal implementation of government policies against subsidized fertilizer policies developed by the government based on the needs of the community, especially farmers. In its application, this fertilizer is intended for farmers to increase productivity and improve economic level, also minimizes costs. The purpose of this study is to find out how the implementation of subsidized fertilizer policy in Indonesia. The findings in this study are one of the programs of government policy related to subsidized fertilizers, namely the farmer card program registered in the Group Needs Definitive Plan (RDDK) system. However, according to surveys, there is still a scarcity of subsidized fertilizers so that the price becomes expensive. And many farmers who are not part of the Group Needs Definitive Plan (RDDK) system also need subsidized fertilizers, but the government only provides them to farmers who are members of the RDDK system. In addition, the Indonesian government has implemented various measures to ensure the distribution of subsidized fertilizers to farmers, one of the steps taken is to socialize changes in subsidized fertilizer policies.

PENDAHULUAN

Pupuk merupakan kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, pupuk perlu untuk disubsidi. Menurut (Gunawan & Pasaribu, 2020) industri pupuk

subsidi di Indonesia dibangun melebihi kebutuhan, serta dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pupuk Indonesia. Hal tersebut di perkuat dengan laporan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi yang jumlahnya lebih besar dari alokasi pupuk subsidi tahun ini. Di mana, pemerintah secara resmi telah menaikkan kuota pupuk bersubsidi tahun 2024 dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Dengan alokasi anggaran dari Rp26,7 triliun menjadi Rp53,3 triliun (CNBC Indonesia, 2024). Namun demikian, kebijakan subsidi pupuk masih merupakan isu nasional yang tidak kunjung mendapatkan solusi yang permanen (Gunawan & Pasaribu, 2020). Padahal berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan pemberdayaan. Pertanian merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan Masyarakat (Rusdia, 2024).

Untuk menerima pupuk bersubsidi, petani di Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk menjadi bagian dari kelompok tani yang telah menyusun rencana definitif kebutuhan pertaniannya (RDKK) (Brebeskab, 2023). Kabupaten Sinjai menjadi salah satu daerah dengan penerimaan pupuk subsidi. Dengan jumlah alokasi pupuk subsidi sebesar 5 ribu ton pupuk UREA dan 2 ribu ton NPK pada tahun anggaran 2022. Megalami peningkatan 6 ribu ton pupuk UREA dan 5.400 ton NPK pada tahun anggaran 2023. Sedangkan di tahun 2024 kembali menurun sekitar 6 ribu ton menjadi 3.568 ton pupuk UREA dan 5.400 ton menjadi 3.489 ton pupuk NPK. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2024.

Penentuan kuota pupuk subsidi di tentukan langsung oleh kementrian pertanian RI. Kriteria atau persyaratan yang harus di penuhi petani untuk mendapatkan akses pupuk subsidi ada dua yaitu yang pertama luas lahan yang di miliki petani tidak lebih dari 2 hektare tanah. kedua petani harus tergabung dalam penyusunan (e- RDKK) kelompok tani. Berdasarkan dari hasil wawancara oleh tim kerja pupuk pestisida dan alat dan mesin pertanian (Alsintan) Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa pada tahun 2006-2020 tingkat ketersediaan pupuk subsidi cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. Namun di tahun 2021- 2023 ketersediaanya

belum mencukupi atau terbatas nya jumlah pupuk subsidi.

Disamping itu, banyak petani yang bukan bagian dari sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) juga membutuhkan pupuk bersubsidi, namun pemerintah hanya memberikannya kepada petani yang tergabung dalam sistem RDKK. Pemerintah telah menerapkan langkah-langkah untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi, seperti pemantauan oleh polisi dan penggunaan kios resmi (B.Putra, 2021).

Beberapa penelitian terkait, penelitian oleh (Anisa & Adnan, 2021) salah satu instrumen kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah memberikan subsidi harga pupuk. kebijakan pupuk bersubsidi belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang berkualitas dan terjangkau bagi petani. Kemudian penelitian dari (Sugiono & Faridatul Gufroniah, 2022) menyatakan bahwa pada dasarnya pupuk bersubsidi berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, problematika mendasar yang justru terjadi adalah bahwa tingkat pendistribusian pupuk bersubsidi cenderung lebih rendah dibanding penyaluran pupuk non-subsidi. Kemudian penelitian dari (Kurniandini & Fahrub, 2022) menyatakan bahwa Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal menjadi sebuah hal yang sangat membantu para petani untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi Analisis Bisnis Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Tinjau Dari Ekonomi Islam tersebut melalui kelompok tani masing-masing. Akan tetapi, hal tersebut mengakibatkan harga pupuk yang dijual lewat kelompok tani menjadi lebih tinggi, tidak sesuai dengan penetapan harga, dengan kata lain tidak sesuai dengan harga pasar. Dengan terjadinya penambahan harga tersebut, maka dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini mengalami kerugian dan ketidakadilan. Selanjutnya pada penelitian (Ragimun, Makmun, 2020) Kejanggalan terjadi karena kesalahan pengumpulan data "RDKK", distribusi pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berwenang, besarnya volume distribusi, pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi serta kendala dalam penghitungan subsidi pupuk. Salah satu rekomendasi yang dapat diajukan untuk penyaluran pupuk bersubsidi secara efektif adalah beberapa jalur alternatif dapat dilaksanakan. Salah satu alternatif penyaluran pupuk bersubsidi antara lain penggunaan kartu listrik melalui "Gapoktan", penyaluran subsidi pupuk melalui penggunaan kios Pupuk Indonesia Mart dan melalui penyaluran langsung kepada produsen pupuk di Indonesia.

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan pemerataan pupuk bersubsidi kepada petani di negara ini. Namun, masalah

distribusi pupuk bersubsidi yang tidak merata di Indonesia masih terus berlanjut, dan diperlukan lebih banyak upaya untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan penjelasan, studi terdahulu lebih banyak membahas tentang ketidakmerataan pendistribusian pupuk bersubsidi serta lokasi penelitian juga menjadi pembedanya. Maka kebaharuan yang di tawarkan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perasaan dan perilaku individual atau kelompok orang. Adapun sumber data dalam penelitian ini di ambil dari penelitian terdahulu yakni; artikel jurnal yang relevan, dan portal berita pemerintah serta data primer yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya tekhnik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Tahapan dalam analisis data yakni pengumpulan data meliputi mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimana peneliti memilih, memilah dan memisahkan, menyederhanakan dan mengabstraksikan data-data yang diperoleh selama penelitian. Selanjutnya Penyajian data dapat diartikan sebagai pengorganisasian data yang telah direduksi. Yang terakhir Penarikan kesimpulan, Berdasarkan pada data yang telah terorganisir tersebut, peneliti memberikan interpertasi dan kemudian menarik kesimpulan mengenai pola keteraturan ataupun penyimpangan yang ada dalam fenomena yang akan diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian pupuk subisidi petani dalam meningkatkan kemajuan dalam inovasi perubahan pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian, subsidi sebagai factor pendukung dari pelaksanaan kebijakan pemerintah yang optimal terhadap kebijakan pupuk subsidi yang di kembangkan pemerintah atas dasar kebutuhan masyarakat khususnya petani,dalam penerapan pupuk ini untuk melindungi petani

meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi, juga meminimalkan biaya.yang intinya guna untuk merealisasikan peran strategis kebijakan fisika yang baik khususnya subsidi pupuk kepada petani yang pasti dukungan kebijakan pertanian yang baik dan tepat,agar implementasinya mewujudkan sector petani yang berkedaulatan pangan serta berkelanjutan dan terwujud sumber daya yang tercapai dengan efektif (Ragimun, Makmun, 2020).

Kebijakan Pupuk Subsidi Di Indonesia

Implementasi kebijakan pupuk subsidi di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1969 dengan Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya subsektor pangan. Namun, kebijakan yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun ini tidak efektif bahkan menimbulkan kerugian. Beberapa hasil survei mengidentifikasi masalah di banyak daerah, termasuk pencampuran pupuk bersubsidi dan nonsubsidi. Merebaknya kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga harganya menjadi mahal, serta penyimpanan dan penukaran paket pupuk bersubsidi dengan yang nonsubsidi (Grehenson,2022.). Implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan aturan dalam upaya mencapai aturan program kebijakan (Aznar, 2023; Sangil & Maceda, 2023; Zhang & Shen, 2022). Pembuatan peraturan pupuk pertanian tentang kebutuhan pupuk dan harga eceran tertinggi memiliki keterkaitan dengan SK gubernur tentang kebutuhan,penyaluran dan harga eceran tertinggi. Komunikasi dalam implementasi penyaluran pupuk bersubsidi sendiri juga harus jelas dan dapat bertanggung jawab. Perlunya kejelasan dalam dan tanggung jawab ini agar dapat terhindar dari miskomunikasi sehingga menghambat implementasi kebijakan (Gunawan & Pasaribu, 2020). Pupuk memegang peranan penting dalam menunjang produktivitas tanaman pangan. Pemerintah Indonesia memberikan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Jumlah pupuk bersubsidi yang dibutuhkan negara meningkat setiap tahun. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pengadaan yang tepat untuk memenuhi target pemerintah dalam produksi pupuk bersubsidi. Pupuk NPK jenis ini menjadi salah satu perhatian, karena permintaan pupuk jenis bersubsidi ini tinggi, namun tingkat produksinya masih jauh dari target yang sebenarnya.(Febrianti, 2021)

Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Termasuk pula di dalamnya benih, pupuk, pestisida, obat-obatan, dan alat teknologi lainnya.Teknologi baru yang diterapkan dalam bidang pertanian selalu

dimaksudkan untuk menaikkan produktifitas, apakah produktifitas tanah, modal atau tenaga kerja. Seperti halnya traktor lebih produktif dari pada cangkul, pupuk buatan lebih produktif dari pada pupuk kandang.

Pupuk bersubsidi adalah bahan kebutuhan petani yang pengadaan dan penyalurannya dibiayai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani penggergajian atau petani di bidang pertanian antara lain Pupuk Urea, Pupuk SP36, Pupuk ZA; Pupuk NPK dan pupuk bersubsidi lainnya ditetapkan oleh menteri pertanian. Ada enam asas kepatutan yang harus diperhatikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yaitu asas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.(Lestari & Wijayanto, 2022)

Sebagai negara agraris, Indonesia terkenal dengan keanekaragaman sumber daya alamnya sehingga memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang mandiri dalam bidang produksi pangan. Untuk mencapai hal tersebut, negara memerlukan berbagai perangkat untuk mendukungnya, termasuk dana fiskal untuk menjamin kelancaran distribusi pupuk ke petani. Pendistribusian pupuk saat ini masih terhambat oleh implementasi politik yang tidak efektif, meskipun aturan dan regulasi yang terkait relatif lengkap. Oleh karena itu, perlu dikaji kebijakan penyaluran subsidi pupuk di Indonesia dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi ini untuk kelompok tani disusun melalui musyawarah yang dipimpin langsung oleh ketua kelompok tani dan didampingi oleh penyuluh, untuk selanjutnya dimasukkan dalam rencana denifitif kebutuhan kelompok tani (Ragimun, 2020)

Pupuk merupakan kebutuhan dasar dalam usaha tani, sehingga keberadan dan distributornya harus selalu ada. Berdasarkan harganya ada 2 jenis pupuk yang disediakan oleh pemerintah, yaitu pupuk bersubsidi dan non subsidi. Kebijakan pupuk bersubsidi ini telah diatur oleh dalam peraturan Presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi yang diatur dalam pengawasan pemerintah. Permasalahan yang di alami dalam pengimplementasian pupuk bersubsidi yaitu kesulitan dalam penggunaan kartu subsidi,belum diwajibkan pemda,kurangnya sosialisasi penyuluh oleh pemda, tidak terbiasa berhubungan baik dengan bank,adanya tambahan biaya dalam pengangkutan pupuk,serta tidak tersedianya pupuk bersubsidi di toko pengecer (Darwis & Supriyati, 2016)

Hasil dalam survei mengenai implementasi pupuk bersubsidi di tahun 2018-sekarang masih sangat dibutuhkan petani untuk membatu keterbatasan biaya usaha tani.

Pemerintah juga membantu penyediaan pupuk bersubsidi untuk terus mendukung upaya peningkatan produksi atau setidaknya untuk meningkatkan produksi serta mempertahankan komoditas pertanian. Dalam pengimplementasian pupuk bersubsidi ini pada tahun 2018 ada namanya kartu tani yang diterapkan untuk petani, kartu tani ini dilakukan uji coba pada tahun 2016-2018(Gunawan & Pasaribu, 2020). Berdasarkan informasi tentang pupuk bersubsidi sebagaimana dalam program kerja kartu tani dengan keputusan Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 11/kpts/SR.310/B/03/2020 tentang petunjuk teknis penggunaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran yaitu tentang pengusulan,pencetakan dan penembusan.(Lestari & Wijayanto, 2022). Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis yang mendalam diperlukan dalam mengevaluasi kebijakan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan;

Dampak ekonomi

Analisis ekonomi yang komprehensif dapat membantu dalam memahami dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.Dampak ekonomi yang dirasakan oleh Kelompok Tani Tebu Sri Dadi akibat dari adanya kebijakan pembatasan perolehan pupuk subsidi adalah meningkatnya biaya operasional perawatan. Jumlah perolehan pupuk subsidi yang semakin sedikit membuat Kelompok Tani Tebu Sri Dadi dalam mencukupi kebutuhan pupuk yaitu dengan cara membeli pupuk organik cair dan pupuk non subsidi.

Dampak sosial

Kebijakan dapat memiliki konsekuensi sosial yang signifikan, seperti pengaruh terhadap kesetaraan, kemiskinan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta stabilitas sosial. Analisis sosial dapat membantu mengidentifikasi kelompok yang rentan terhadap kebijakan tertentu dan memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dengan baik.Dampak sosial terkait dengan kebijakan pembatasan perolehan pupuk subsidi mengakibatkan Kelompok Tani Tebu Sri Dadi di Desa Gondang mengalami kekurangan dalam pupuk yang berdampak terhadap penurunan kualitas hasil produksi tanaman tebu sehingga tidak dapat mencapai

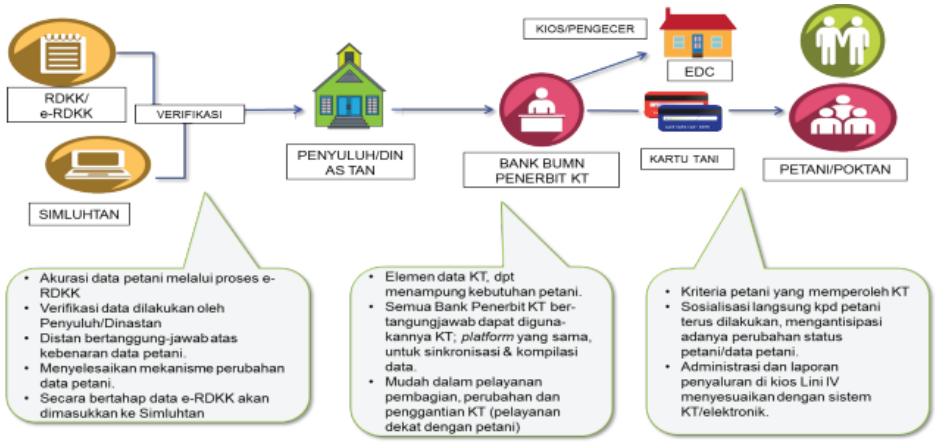
target di pasaran dan mempengaruhi rendahnya penghasilan yang diperoleh petani dari hasil penjualan panen tebu.

Dengan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak-dampak ekonomi, dan sosial, dari suatu kebijakan, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.(Rohmawati et al., 2023)

Program Kartu Tani

Kartu Tani merupakan kartu debit co-branded BNI yang digunakan khusus untuk mengantarkan pupuk bersubsidi dan membaca transaksi pembayaran pupuk bersubsidi ke Electronic Data Capture Machine (EDC) BNI yang ditempatkan di pengecer dan dapat digunakan untuk melakukan seluruh transaksi perbankan secara umum. Kartu tani bertujuan untuk melakukan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi kepada petani yang menerimanya (Suprianto et al., 2021)Pada prinsipnya kartu tani berfungsi sebagai kartu bank untuk menerima simpanan, pinjaman, hibah dan subsidi, yang memuat identitas petani pemilik kartu tersebut. Kartu tani merupakan database yang berisi informasi tentang identitas petani (nama, nomor induk nasional (NIK) dan alamat), luas wilayah, komoditi, penyaluran pupuk bersubsidi, kebutuhan saprotan dan hasil panen (Gunawan & Pasaribu, 2020). Manfaat dari Kartu Tani ini juga memberikan informasi dan pemantauan kepada pemerintah kota, pemerintah produsen input pertanian dan pedagang yang menangani pupuk bersubsidi. Program kartu tani didasarkan pada hasil litbang KPK, BPK dan rekomendasi mandat APBN terkait penyaluran bantuan negara, termasuk pupuk bersubsidi, sesuai target (Sarana, 2012). Sistem kartu tani dirancang untuk menggunakan fasilitas penerbit kartu (dalam hal ini Bank BRI), Kementerian Pertanian (Bulog, PT). Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan dalam entri data, verifikasi, pemantauan dan menghubungi staf konsultan. Dengan kartu tani yang terintegrasi elektronik, pemerintah dapat memantau produksi dan distribusi pupuk oleh petani. Selain itu, petani mendapatkan ketenangan pikiran atas pupuk bersubsidi, praktik penghematan, dan penjualan hasil panen yang mudah. Kios pupuk mendapat tambahan pemasukan sebagai penghubung BRI seiring dengan upaya pemerintah mensosialisasikan dan mensosialisasikan program ini (Gunawan & Pasaribu, 2020).

Gambar 2. . Mekanisme Penerbitan, Distribusi dan Penggunaan Kartu Tani,



Sumber . *(Gunawan & Pasaribu, 2020).*

Gambar diatas menunjukkan mekanisme pengeluaran atau pendistribusian dan penggunaan kartu tani, dalam penerbitan kartu tani banyak tahapan yang harus kita lakukan, dimulai dengan aktivasi kartu oleh bank penyalur, dimana kartu tani dikonversi ke dalam kuota pupuk bersubsidi (urea);(NPK);(SP-36),(Organik) yang menjadi hak setiap petani. Kuota jumlah pupuk tergantung wilayah e-RDKK. Kartu tani juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat diisi uang setoran, sehingga ketika petani membeli pupuk di kios cukup menggesek kartu di mesin Pengumpul Data Elektronik (EDC) (Gunawan & Pasaribu, 2020).

Dari hasil penelitian, proses pembuatan kartu tani khususnya dalam hal pendistribusiannya cukup lama, karena proses pembuatan kartu tani harus melalui beberapa tahapan yang luar biasa. Selain itu, partisipasi para pelaku yang terlibat juga mempengaruhi waktu pembagian kartu tani. Di Desa Siwarak, terkait sarana dan prasarana pendukung program Kartu Tani, menurut hasil survei tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), tersedia Wi-Fi dan alat tulis, namun sarana penting seperti komputer rusak dan dicuri. Sementara itu, Kios Pupuk Lengkap (KPL) memiliki beberapa fitur Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan dalam layanan Kartu Tani.(Lestari & Wijayanto, 2022).

Sosialisasi Perubahan Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Perang antara Rusia dan Ukraina,yang merupakan pemasok terbesar komponen utama produksi pupuk, yaitu fosfat dan kalium sangat mempengaruhi harga pupuk dunia. Selain

itu, masalah global Covid-19 yang kita hadapi selama dua tahun terakhir ini tentu mengguncang perekonomian global. Tentunya kedua isu tersebut juga mempengaruhi Indonesia, khususnya di sektor pertanian. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pupuk bersubsidi, pemerintah telah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Menteri Pertanian yang diperintahkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo pada bulan Juli., berisi tentang tata cara penetapan distribusi dan harga eceran maksimum pupuk bersubsidi di sektor pertanian, (EKANEDI, n.d.)

Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI, di dalam peryataannya sudah saatnya pemerintah melakukan kajian bagaimana mengubah subsidi pupuk menjadi harga. Subsidi pupuk telah diperkenalkan sejak pemerintahan Orde Baru, ketika Presiden Soeharto memutuskan untuk mensubsidi pupuk untuk mewujudkan swasembada pangan. Tujuan itu tercapai pada tahun 1984 dan beberapa tahun kemudian, hingga Indonesia terbebas dari ketergantungan impor bahan pangan pokok. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, memang perlu kajian mendalam yang melibatkan banyak pakar, baik akademisi maupun profesional, untuk mengarahkan kebijakan. Sudah banyak negara di luar negeri, seperti Amerika dan beberapa negara Eropa, yang memilih mendukung produksi ketimbang input (DPR, n.d 2021).

Oleh karena itu, DPRD Sulsel II meminta pemerintah mengkaji perubahan distribusi subsidi di sektor pertanian dari subsidi input menjadi subsidi produksi untuk mengurangi risiko jatuhnya harga pertanian saat panen raya. musim yang dapat merugikan petani. Akmal menambahkan, sejak 2015, anggaran Kementerian Pertanian menurun dari Rp 32,72 triliun pada 2016 menjadi Rp27,72 triliun, pada tahun 2017 menjadi Rp24,23 triliun dan pada tahun 2018 menjadi Rp23,90 triliun, pada tahun 2019 menjadi Rp21,71 trilium. untuk tahun 2020 Rp21,05 triliun, untuk tahun 2021 Rp,15,51 trillium dan kini batas indikatif untuk tahun 2022 adalah Rp14,51 triliun. Penyusutan anggaran Kementerian Pertanian yang terus berlanjut juga dibarengi dengan pengurangan subsidi pupuk, meskipun tingkat subsidi pupuk masih lebih tinggi dari anggaran Kementerian Pertanian, (DPR, n.d 2021).

Selain perubahan jenis barang dan pupuk, mekanisme penetapan penyaluran pupuk bersubsidi juga berubah. Mekanismenya dimulai dengan,menetapkan pagu anggaran dukungan Perbendaharaan;,Penetapan alokasi kabupaten per kabupaten oleh Departemen Pertanian;, Keputusan Gubernur tentang Alokasi

Pemerintahan/Kota;,Keputusan Dewan Negara/Walikota tentang penyaluran kecamatan untuk petani yang menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani (DPKP, n.d.2022).

Jadi perbedaannya adalah jika sebelumnya menggunakan mekanisme top-down, sekarang mekanisme top-down yang memperhitungkan ketersediaan anggaran, share wilayah dan database petani di Simluhtan. Level ditentukan dengan:,data lokasi negara petani; Presentasi distribusi pupuk dari sub-daerah melalui e-RDKK;Gubernur memberikan pupuk bersubsidi kepada kabupaten/kota. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota selanjutnya dirinci per kecamatan, jenis pupuk, jumlah, CPCL (Penetapan Calon Petani Calon lokasi) dan penyaluran bulanan. Permentan 10 Tahun 2022 juga mengatur redistribusi penyaluran pupuk bersubsidi dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten (DPKP, n.d.2022).

PENUTUP

Pupuk subisidi petani ditujukan untuk meningkatkan kemajuan dalam inovasi perubahan pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian, kita dapat mengetahui kemajuan teknologi yang semakin meningkat di sector pertanian dengan adanya kebijakan , pemerintah daerah berperan dalam entri data, verifikasi, pemantauan dan menghubungi staf konsultan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan adanya kartu tani yang terintegrasi elektronik, pemerintah dapat memantau produksi dan distribusi pupuk oleh petani, sehingga pemerintah dapat mengelolah sector pertanian dengan baik dan petani yang berkemajuan. walaupun kebijakan yang di keluarkan pemerintah, masih banyak petani yang kurang paham dengan kebijakan ini, tetapi seiring berjalanya peningkatan teknologi sumber daya manusia dalam sector pertanian akan masyarakat akan paham dan mulai menjadi petani yang maju di iringi perkembangan teknologi.

Pupuk merupakan kebutuhan dasar dalam usaha tani, sehingga keberadan dan distributornya harus selalu ada bagi setiap petani, dan membutuhkan terus bantuan pupuk subsidi yang efisien dari pemerintah pengelolah, sector pertanian, dan Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian. Termasuk pula di dalamnya benih, pupuk, pestisida, obat-obatan, dan alat teknologi yang dapat membantu petani dalam mengelolah hasil pertanianya, untuk menjadi petani yang maju dan tidak tertinggal dari penggunaan alat alat teknologi.

Namun dalam pemerataanya Faktanya banyak petani yang bukan bagian dari sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDDK) juga membutuhkan pupuk bersubsidi, namun pemerintah hanya memberikannya kepada petani yang tergabung dalam sistem RDDK. Kemudian dari pada itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan pemerataan pupuk bersubsidi kepada petani di negara ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama- tama saya berterima kasih kepada allah swt yang telah memberikan saya nikmat Kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal saya dengan tepat waktu, kedua selanjutnya saya berterima kasih kepada keluarga besar saya yang telah memberikan saya izin dan mendukung saya dalam kegiatan pertukaran mahasiswa ini, ketiga saya berterima kasih kepada seluruh scifitas akademis Universitas Muhammadiyah Sinjai yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa melalui kemendikbut ristek dalam program kompetisi kampus merdeka (PKKM). Keempat ucapan terimah kasih saya terhadap scivitas akademi penerima pertukaran mahasiswa merdeka oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman teman pertukaran mahasiswa juga banyak membantu sehingga terselesainya jurnal ini.Harapan saya semoga adanya jurnal ini dapat memberikan wawasan baru terhadap pembaca terkait Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi di dinas tanaman pangan holtikultural dan Perkebunan kabupaten sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, F., & Adnan, M. F. (2021). Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *5*(4), 1137–1150. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2496

Aznar, O. (2023). Defining environmental services from agriculture to better understand the implementation of European agri-environmental policy. *Environmental Science and Policy*, *139*, 22–28. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.10.009

B.Putra, M. (2021). *Pelayanan Penyediaan Pupuk Bagi Petani*. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--pelayanan-penyediaan-pupuk-bagi-petani

Brebeskab, D. (2023). *Cara Mengecek Kuota Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 Bagi Petani*. Dpkp.Brebeskab.Go.Id. https://dpkp.brebeskab.go.id/1815/cara-mengecek-kuota-pupuk-bersubsidi-tahun-2023-bagi-petani/

Darwis, V., & Supriyati, N. (2016). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, *11*(1), 45. https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60

DPKP. (n.d.). *Perubahan Kebijakan Penyaluran PUPUK BERSUBSIDI dalam PERMENTAN 10 Tahun 2022*. DPKP KABUPATEN BREBES. https://dpkp.brebeskab.go.id/1676/perubahan-kebijakan-penyaluran-pupuk-bersubsidi-dalam-permentan-10-tahun-2022

DPR. (n.d.). *Andi Akmal: Alihkan Subsidi Pupuk jadi Subsidi Harga*. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33980/t/Andi+Akmal%3A+Alihkan+Subsidi+Pupuk+jadi+Subsidi+Harga

EKANEDI, E. (n.d.). *SOSIALISASI PERUBAHAN KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI*. BERITA DINAS PERTANIAN. Retrieved December 7, 2022, from https://dinaspertanian.dharmasrayakab.go.id/berita/23/sosialisasi-perubahan-kebijakan-pupuk-bersubsidi.html

Febrianti, R. (2021). *PENENTUAN ORDER QUANTITY BAHAN BAKU PUPUK BERSUBSIDI JENIS NPK MENGGUNAKAN METODE EOQ DI PT. PETROKIMIA GRESIK*. https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/6637

Grehenson, G. (n.d.). *UGM Soroti Kebijakan Pupuk Bersubsidi Belum Tepat Sasaran*. https://ugm.ac.id/id/berita/22716-ugm-soroti-kebijakan-pupuk-bersubsidi-belum-tepat-sasaran

Gunawan, E., & Pasaribu, S. (2020). Persepsi Petani Dan Permasalahan Program Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *28*(2), 131–144. https://doi.org/10.14203/jep.28.2.2020.131-144

Indonesia, P. berita C. (2024). *Subsidi Naik Jadi 9,5 Juta Ton, DPR Warning Ancaman Pupuk Langka*. CNBC INDONESIA. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240402151702-4-527587/subsidi-naik-jadi-95-juta-ton-dpr-warning-ancaman-pupuk-langka

Kurniandini, S., & Fahrub, A. W. (2022). Analisis Bisnis Distribusi Pupuk Bersubsidi di Tinjau dari Ekonomi Islam di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, *9*(2), 241–249.

Lestari, O., & Wijayanto, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani. *Journal of Political Issues*, *3*(2), 98–106.

Ragimun, Makmun, S. S. (2020). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, *10*(1), 69–89. https://doi.org/10.35968/m-pu.v10i1.369

Ragimun. (n.d.). *Kebijakan Penerapan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia*. Badan

Kebijakan Fiskal. https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/12/30/161433573018506-kebijakan-penerapan-penyaluran-pupuk-bersubsidi-di-indonesia

Rohmawati, V. N., Astutik, D., Purwanto, D., & Kunci, K. (2023). *Strategi Bertahan Hidup Kelompok Tani Tebu Sri Dadi SebagaiDampak Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi*. *9*(September), 290–300.

Rusdia, U. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI SISTEM BERTANI DENGAN AGRO SOLUTION (SIBEDAS) OLEH DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG*. *8*, 1–20.

Sangil, M. J., & Maceda, L. L. (2023). Citizen Feedback Analytics for Inclusive Policy Design and Decision-making: A Case Study on the Implementation of Low-speed Streets. In Y. X.-S., S. S., D. N., & J. A. (Eds.), *7th International Congress on Information and Communication Technology, ICICT 2022* (Vol. 465, pp. 313–325). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2397-5_29

Sarana, D. J. P. dan. (2012). *Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian*.

Sugiono, S., & Faridatul Gufroniah, S. (2022). Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *5*(1), 371–385. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1465

Suprianto, Putu Karismawan, Lukman Hakim, Sujadi, & Eka Agustiani. (2021). Sosialisasi Program Kartu Tani Bagi Kios Tani Pengecer Pupuk Bersubsididan Kelompok Tani di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, *4*(4), 508–513. https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i4.1253

Zhang, T., & Shen, D. (2022). Can recycled water policy in China adapt to local conditions: A policy implementation perspective. *Journal of Cleaner Production*, *380*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134840